

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perpustakaan merupakan suatu kesatuan kerja yang menangani koleksi dan informasi untuk kepentingan masyarakat pemakai. Perpustakaan pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyediakan layanan informasi kepada mereka yang membutuhkan. (Sutarno, 2008). Perpustakaan lebih dari sekedar tempat mengumpulkan, mengolah, dan melestarikan barang perpustakaan; juga berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Perpustakaan tidak hanya sebagai sarana rekreasi, namun juga sebagai wadah dalam memberikan informasi dan juga edukasi, khususnya proses pengembangan karakter mandiri, memperoleh keterampilan, memperluas wawasan, dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang muncul di masyarakat. (Subrata, 2010).

Perusahaan penerbitan dan pencatatan berkembang pesat di wilayah-wilayah yang berkembang pesat, dan teknologi informasi menjadi lebih maju, sehingga memudahkan mereka dalam membuat karya. Yang kemudian karya yang diterbitkan wajib disimpan untuk kemudian dikelola dan digunakan di masa depan. (Islamiati & Haqqi, 2022). Perpustakaan merupakan lembaga yang berwenang mengelola dan melestarikan bahan pustaka baik yang dicetak maupun yang belum dicetak. Perpustakaan harus menyimpan segala bentuk pengetahuan tentang hasil karya manusia dari suatu daerah tertentu. Penanggung jawab pengendalian karya cetak dan rekaman yang diterbitkan di masing-masing daerah ada di bidang deposit. Layanan deposit bertanggung jawab dalam menjaga dan juga melestarikan bahan pustaka yang diserahkan dan juga menghimpun publikasi mengenai Indonesia baik di dalam negeri maupun internasional. Segala koleksi yang terbitannya di daerah, maka layanan deposit haruslah mengoleganya dengan baik agar seluruh materi yang terkandung di dalamnya aman dan mudah diambil (Sari, 2019) .

Penghimpunan koleksi tersebut koleksinya dikumpulkan dari penerbit dan pengusaha rekaman di Republik Indonesia yang wajib menyerahkan karyanya ke Perpustakaan Nasional dan Provinsi. Simpanan tersebut dihimpun sebagai hasil budaya bangsa atau kearifan lokal, yaitu suatu pendapat atau pengetahuan tradisional yang diwariskan selama hidup guna pemenuhan kebutuhan informasi dan menjawab permasalahan yang ada. Kearifan lokal mempunyai fungsi dan penting dalam masyarakat serta berguna bagi kehidupan, dalam pemeliharaan adat dan budaya, koleksi lokal, dan hasil intelektual masyarakat sekitar. Untuk melestarikan prestasi budaya negara, karya cetak dan rekaman disimpan di perpustakaan yang disebut koleksi deposit. Hal ini sejalan dengan Surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ  
 أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ  
 كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ  
 اللَّهَ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Departmen Agama RI, 2009) .*

Surat ini mengandung makna bahwa menjaga koleksi yang ada di perpustakaan sama dengan orang yang terdahulu yang telah memelihara Kitab Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Allah meskipun dijaga, demikian pula

buku yang terdapat di perpustakaan, karena mau bagaimanapun, kedua benda tersebut merupakan benda warisan yang sangat berharga.

Menurut Atho' dan Thawus, maksud "kafir" dalam ayat ini bukanlah orang-orang kafir yang murtad dari agama Islam, melainkan orang-orang yang kafir nikmat sehingga menghilangkan kedudukan seorang muslim dari agama Islam. Hal ini serupa dengan orang yang meninggalkan shalat wajib; jika dia masih meyakini bahwa shalat itu wajib dan perintah Allah, maka dia tidak dianggap kafir, melainkan fasik dalam agamanya. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama, antara lain al-Qurthubi, al-Alusi, alGhazali, ash-Sya'rowi, dan masih banyak lagi. (Maarif, 2022).

Dalam tafsirnya, At-Thabari mengatakan bahwa ayat ini mempunyai riwayat asbabun nuzul yang bermacam-macam. Pertama, turunnya ayat ini berkaitan dengan hukuman sah raja bagi individu yang melakukan perzinahan di kalangan Yahudi. Kedua, turunnya ayat ini mengacu pada pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Yahudi yang kuat, Bani Quraidzah, terhadap golongan bawah, Bani Nadzir. Namun denda yang dijatuhkan adalah setengah dari denda Bani Nadzir. (Abu Ja'far, 2009).

Pentingnya pelestarian karya budaya nasional tertuang dalam poin b UU RI Nomor 13 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Bahwa karya cetak dan rekaman hasil kebudayaan nasional memiliki peran yang penting dan dijadikan tolak ukur dalam kemajuan pendidikan dan juga intelektual bangsa, serta rujukan dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sumber dan penyebaran informasi, serta pelestarian kebudayaan nasional. Tidak hanya itu, karya yang dihasilkan juga sebagai sarana dalam menelusur dan mencari catatan sejarah, jejak peradaban dan perubahan serta perkembangan bangsa guna pembangunan dan kepentingan nasional".

Visi dan Misi Perpustakaan Nasional adalah mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan terkini, serta memperluas jangkauan perpustakaan kepada masyarakat luas dalam rangka memajukan keanekaragaman budaya dan melestarikan koleksi nasional untuk mendukung masyarakat belajar, seperti: karya cetak dan rekaman. Perpustakaan Nasional sendiri merupakan perpustakaan yang sengaja dibangun untuk menghimpun bahan pustaka tercetak maupun tidak dengan tujuan pelestarian berdasarkan UU No 13 Tahun 2018 . Pada pasal 1 ayat 7 diperjelas lebih lanjut bahwa "Perpustakaan Provinsi ialah organisasi yang masuk

kedalam perangkat daerah yang dalam penyelenggaraan kegiatannya di bidang perpustakaan sebagai perpustakaan pengawas, referensi, deposit, penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berlokasi di ibu kota provinsi”.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara merupakan perpustakaan umum provinsi yang bertujuan untuk menghimpun dan melestarikan karya cetak, karya rekaman, karya tulis, dan naskah dokumen hasil karya budaya nasional yang dihasilkan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan UU No 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Perpustakaan wajib memberitahukan kepada penerbit dan pelaku usaha rekaman di Provinsi Sumatera Utara mengenai Undang-undang ini. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 281 penerbit karya cetak dan karya rekaman digital aktif di Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan UU No 13 Tahun 2018, dengan total penerimaan sebanyak 7.258 judul dan 13.957 eksemplar. Data tersebut diperoleh dari [depbangkol.perpusnas.go.id](http://depbangkol.perpusnas.go.id), Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu pada tahun 2023 mempunyai koleksi deposit tentang Sumatera Utara sebanyak 3.005 judul dengan total 3.480 eksemplar, dan mempunyai koleksi daerah per kabupaten/kota sebanyak 2.894 judul dengan total 3.213 eksemplar. (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, 2024).

Peneliti melakukan observasi langsung ke ruang deposit Dinas terkait dan menemukan beberapa permasalahan dalam proses serah simpan karya cetak dan karya rekam koleksi deposit di lokasi penelitian yang sedang diteliti. Provinsi Sumatera Utara mempunyai banyak pengarang, penerbit, perguruan tinggi namun yang menyerahkan hasil karya atau terbitannya masih kurang. Kesadaran Masyarakat, penerbit maupun perguruan tinggi belum memuaskan dan juga Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu Masih kurang sosialisasi ke penerbit dikarenakan anggaran yang kurang memadai. Berikut adalah tabel serah simpan karya cetak dan karya rekam koleksi deposit di perpustakaan dengan kurun waktu pertahun:

Tabel. 1 Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Deposit Di  
Perpusda

Tahun	Judul	Eksemplar
2018	130	174
2019	1232	1654
2020	285	197
2021	780	980
2022	1144	1325
2023	397	526
2024	237	272

*Sumber: Buku Induk Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu*

Diyakini bahwa kesadaran penerbit dalam mengirimkan karyanya berubah seiring berjalannya waktu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provsu masih memiliki akses terbatas terhadap karya cetak yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit tersebut, dan para penerbit serta penulis tidak mengetahui bahwa perpustakaan ini berfungsi sebagai gudang karya anak bangsa. Sehingga implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 belum optimal ditinjau dari fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provsu dalam melestarikan karya cetak.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik meneliti mengenai “Implementasi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara”.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memerhatikan latar belakang dan telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan penulis berupa:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

#### **E. Manfaat Penelitian**

Tentu saja manfaat melakukan penelitian harus dipertimbangkan. Manfaat penelitian penulis dijelaskan di bawah ini.:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini, sebagai bentuk karya tulis ilmiah, mempunyai potensi memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpustakaan dan informasi. Pemberlakuan UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Pekerjaan menjadi konteks penelitian ini. Karya Cetak dan Rekam Koleksi Deposit Sumatera Utara.
  - b. Temuan penelitian penulis dapat menjadi acuan bagi upaya-upaya kedepannya terkait dengan judul penulis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara menjadi lokasi penelitian diharapkan temuan ini akan menjadi masukan bagi implementasi UU No 13 Tahun 2018 yang bertujuan untuk melestarikan karya Koleksi Deposit Sumut.
  - b. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi yang melakukan penelitian mengenai pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 tentang Koleksi Deposit.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I berisi pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Sistematika Penulisan.

BAB II berisi penjelasan mengenai pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu: Mencakup Tujuan, Fungsi dan Tugas Perpustakaan Umum serta layanan deposit dan Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang No 13 Tahun 2018 dan Penelitian Terdahulu.

BAB III berisi Metodologi Penelitian meliputi Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data dan Pengujian Keabsahan Data

BAB IV berisi Hasil dan Pembahasan penelitian yang mana nantinya akan membahas rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu serta kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

BAB V berisi kesimpulan dan juga saran